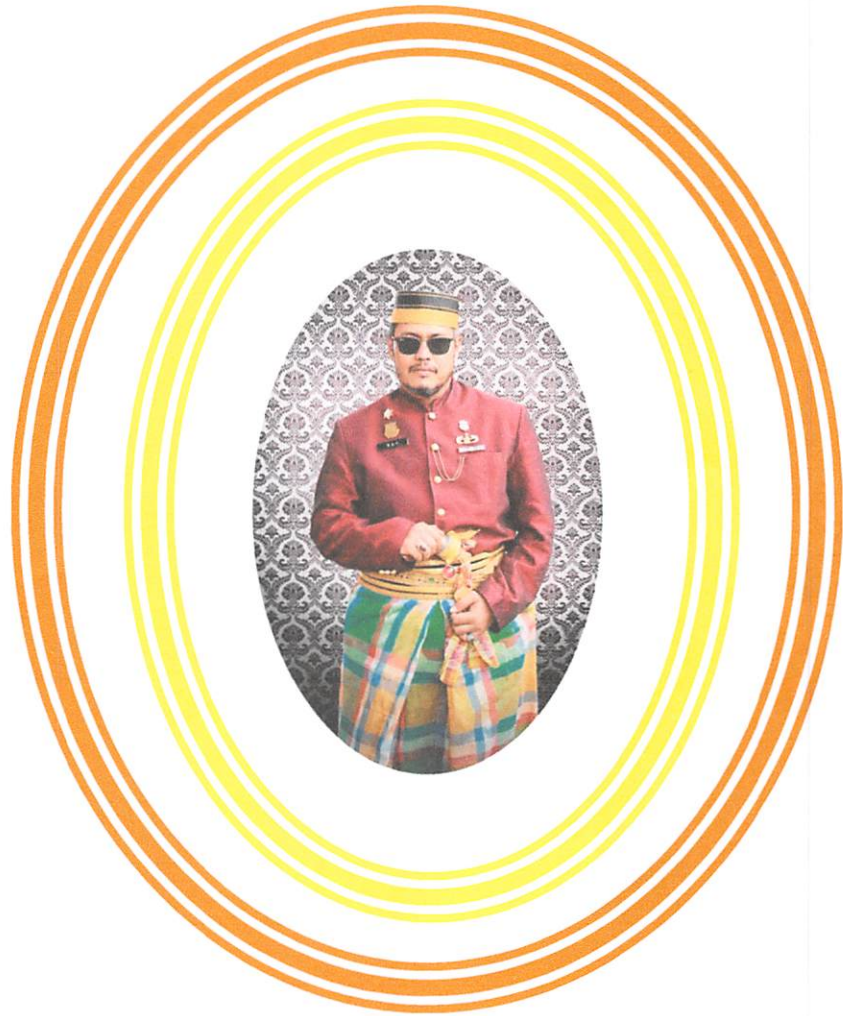




PEMERINTAH  
KABUPATEN BONE

# RENCANA KERJA TAHUN 2019



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar..

Menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung terhadap publik/masyarakat, agar setiap proses yang berlangsung lebih efektif dan efisien.

Otonomi adalah jembatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, begitu juga halnya dengan Kabupaten Bone yang statusnya telah menjadi sebuah kota yang dapat memberikan tantangan yang berat, sekaligus peluang bagi pemerintah Kabupaten Bone. Sebagai daerah otonomi dari aparaturnya untuk menunjukkan kemampuan dalam memeberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran program dan kegiatan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang menjadi referensi yang digunakan menjadi dokumen perencanaan strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, 15 April 2018

KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. BONE



**DRAY VIBRIANTO, S.IP, M.Si**

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19740315 199303 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun Lalu.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	7
2.3 Isu-isu Strategis tugas dan Fungsi SKPD.....	8
<b>BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	9
3.2 Tujuan Dana Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone.....	10
3.3 Program dan Kegiatan.....	11
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>12</b>
<b>Lampiran - Lampiran</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan untuk setiap daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Renstra. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

### **B. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tentang Pelayanan Publik;
26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Kabupaten Bone;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2019;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8 )
37. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2015.
38. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81 )

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone .

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan Profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintahan yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.
2. Meningkatkan kesedaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi sebagai modal utama dalam menjaga keutuhan NKRI.
3. Menciptakan kondisi daerah yang kondusif, aman tenteram dan damai melalui fungsi dan peranan Forum komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkopinda ), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKMD ), Komunitas Intelegen Daerah ( KOMINDA ) dan Forum Pembauran Kebangsaan serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
4. Membina Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga swadaya Masyarakat agar tercipta sinergi demi terciptanya tujuan bersama.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penyusunan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Analisis Kinerja Kegiatan
- D. Isu-isu Strategis tugas dan Fungsi SKPD

#### **BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Tujuan Sasaran
- B. Program dan Kegiatan
- C. Rumusan Strategi dan Kebijakan

#### **BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN...**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

#### TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun lalu

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone adalah penjabaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone pada Tahun 2017 ditetapkan 10 (sepuluh) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan urusan wajib dengan realisasi sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6,400,000,000</b>	<b>6,004,191,707</b>	<b>94</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>674,765,000</b>	<b>626,936,104</b>	<b>93</b>
<b>1</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (1.19.11901.01.02)</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>29,725,944.00</b>	<b>99</b>
	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	29,725,944.00	
	Belanja Telepon	30,000,000.00	29,725,944.00	
<b>2</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (1.19.11901.01.03)</b>	<b>17,300,000.00</b>	<b>16,629,000.00</b>	<b>96</b>
	Belanja Barang dan Jasa	17,300,000.00	16,629,000.00	
	Belanja Jasa Service Alat Elektronik	17,300,000.00	16,629,000.00	
<b>3</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (1.19.11901.01.07)</b>	<b>192,622,200.00</b>	<b>184,203,760.00</b>	<b>96</b>
	Belanja Pegawai	76,395,000.00	76,395,000.00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,645,000.00	21,645,000.00	
	Honorarium Tim Monitoring	12,900,000.00	12,900,000.00	
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	2,250,000.00	2,250,000.00	
	Honorarium Bulanan	39,600,000.00	39,600,000.00	
	Belanja Barang dan Jasa	111,000,000.00	103,600,000.00	
	Belanja Jasa/Upah Kerja	111,000,000.00	103,600,000.00	
	Belanja Premi Asuransi	5,227,200.00	4,208,760.00	
	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	5,227,200.00	4,208,760.00	
<b>4</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (1.19.11901.01.15)</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>19,515,000.00</b>	<b>98</b>
	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	19,515,000.00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	20,000,000.00	19,515,000.00	
<b>5</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH (1.19.11901.01.23)</b>	<b>178,018,000.00</b>	<b>161,038,000.00</b>	<b>90</b>
	Belanja Barang dan Jasa	178,018,000.00	161,038,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,000,000.00	33,020,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128,018,000.00	128,018,000.00	
<b>6</b>	<b>PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.19.11901.01.24)</b>	<b>236,824,800.00</b>	<b>215,824,400.00</b>	<b>91</b>
	Belanja Barang dan Jasa	236,824,800.00	215,824,400.00	



	Belanja Alat Tulis Kantor	66,157,500.00	66,157,500.00	
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5,100,000.00	5,100,000.00	
	Belanja Cetak	30,000,000.00	30,000,000.00	
	Belanja Penggandaan	30,000,000.00	29,999,900.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	84,567,300.00	84,567,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	21,000,000.00	0.00	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>130,143,260.00</b>	<b>117,134,428.00</b>	<b>90</b>
<b>7</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAAN DINAS/OPERASIONAL (1.19.11901.02.05)</b>	<b>19,215,000.00</b>	<b>19,215,000.00</b>	<b>100</b>
	Belanja Modal	19,215,000.00	19,215,000.00	
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	19,215,000.00	19,215,000.00	
<b>8</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR (1.19.11901.02.07)</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>100</b>
	Belanja Modal	15,000,000.00	15,000,000.00	
	Belanja Modal Pengadaan Gorden	15,000,000.00	15,000,000.00	
<b>9</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR (1.19.11901.02.09)</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100</b>
	Belanja Modal	5,000,000.00	5,000,000.00	
	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>10</b>	<b>PENGADAAN MEBELEUR (1.19.11901.02.10)</b>	<b>17,986,460.00</b>	<b>17,986,460.00</b>	<b>100</b>
	Belanja Modal	17,986,460.00	17,986,460.00	
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12,500,000.00	12,500,000.00	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2,900,000.00	2,900,000.00	
	Belanja Modal Pengadaan Almari	2,586,460.00	2,586,460.00	
<b>11</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (1.19.11901.02.22)</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>100</b>
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	
	Belanja Bahan Baku Bangunan	7,000,000.00	7,000,000.00	
<b>12</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (1.19.11901.02.24)</b>	<b>65,941,800.00</b>	<b>52,932,968.00</b>	<b>80</b>
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65,941,800.00	52,932,968.00	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	32,000,000.00	31,999,000.00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	26,941,800.00	16,879,388.00	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,000,000.00	4,054,580.00	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>16,800,000.00</b>	<b>12,950,000.00</b>	<b>77</b>
<b>13</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>16,800,000.00</b>	<b>12,950,000.00</b>	
	Belanja Pegawai	10,800,000.00	9,450,000.00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000.00	9,450,000.00	
	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	3,500,000.00	
	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	2,000,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	1,500,000.00	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>	<b>49,270,000.00</b>	<b>28,090,000.00</b>	<b>57</b>
<b>14</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>49,270,000.00</b>	<b>28,090,000.00</b>	<b>57</b>
	Belanja Pegawai	16,200,000.00	4,950,000.00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,200,000.00	4,950,000.00	
	Belanja Barang dan Jasa	33,070,000.00	23,140,000.00	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	3,000,000.00	1,500,000.00	
	Belanja Cetak	1,120,000.00	840,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000.00	3,150,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,950,000.00	2,650,000.00	

	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>1,770,393,740.00</b>	<b>1,729,950,242.00</b>	<b>98</b>
<b>15</b>	<b>PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN (KOMINDA) (1.19.11901.15.01)</b>	<b>462,600,000.00</b>	<b>462,599,900.00</b>	<b>100</b>
	Belanja Pegawai	2,250,000.00	2,250,000.00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,250,000.00	2,250,000.00	
	Belanja Barang dan Jasa	460,350,000.00	460,349,900.00	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	370,975,000.00	370,975,000.00	
	Belanja Jasa Dokumentasi	6,000,000.00	6,000,000.00	
	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	2,999,900.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,000,000.00	36,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,375,000.00	17,375,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,000,000.00	27,000,000.00	
<b>16</b>	<b>RAKOR POLKAM TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN (1.19.11901.15.11)</b>	<b>472,250,000.00</b>	<b>450,650,000.00</b>	<b>95</b>
	Belanja Pegawai	19,050,000.00	19,050,000.00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,050,000.00	19,050,000.00	
	Belanja Barang dan Jasa	453,200,000.00	431,600,000.00	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	300,000,000.00	300,000,000.00	
	Belanja Jasa Dokumentasi	3,000,000.00	3,000,000.00	
	Belanja Cetak	1,120,000.00	1,120,000.00	
	Belanja Penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,000,000.00	40,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,280,000.00	4,750,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,000,000.00	6,930,000.00	
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	71,800,000.00	71,800,000.00	
<b>17</b>	<b>TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (1.19.11901.15.12)</b>	<b>739,943,740.00</b>	<b>725,935,342.00</b>	<b>98</b>
	Belanja Pegawai	89,100,000.00	86,400,000.00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89,100,000.00	86,400,000.00	
	Belanja Barang dan Jasa	650,843,740.00	639,535,342.00	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	239,800,000.00	239,800,000.00	
	Belanja Jasa Dokumentasi	3,000,000.00	3,000,000.00	
	Belanja Cetak	4,000,000.00	4,000,000.00	
	Belanja Penggandaan	6,000,000.00	6,000,000.00	
	Belanja Sewa Tenda	20,000,000.00	20,000,000.00	
	Belanja Sewa Saund System	10,000,000.00	10,000,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000,000.00	300,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,043,740.00	6,580,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,000,000.00	22,155,342.00	
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28,000,000.00	28,000,000.00	
<b>18</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) (1.19.11901.15.08)</b>	<b>95,600,000.00</b>	<b>90,765,000.00</b>	<b>95</b>
	Belanja Pegawai	10,800,000.00	10,800,000.00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000.00	10,800,000.00	
	Belanja Barang dan Jasa	84,800,000.00	79,965,000.00	
	Belanja Jasa/Upah Kerja	51,300,000.00	51,300,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,900,000.00	14,900,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,600,000.00	3,940,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	9,825,000.00	

<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>2,017,750,000.00</b>	<b>2,007,285,500.00</b>	<b>99</b>
<b>19</b>	<b>PENINGKATAN KERJA SAMA DAN SINERGITAS PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS ANTARA PEMDA ,TNI,POLRI,KEJAKSAAN,PENGADILAN DAN DPRD DI KABUPATEN BONE (1.19.11901.1</b>	<b>1,717,750,000.00</b>	<b>1,709,835,500.00</b>	<b>100</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>62,550,000.00</b>	<b>62,550,000.00</b>	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62,550,000.00	62,550,000.00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,655,200,000.00</b>	<b>1,647,285,500.00</b>	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	187,300,000.00	187,100,500.00	
	Belanja Jasa Dokumentasi	3,000,000.00	0.00	
	Belanja Cetak	5,000,000.00	4,450,000.00	
	Belanja Penggandaan	6,000,000.00	4,800,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	178,700,000.00	178,700,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,000,000.00	25,040,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48,200,000.00	46,195,000.00	
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,201,000,000.00	1,201,000,000.00	
<b>20</b>	<b>SATGAS DAERAH SAPU BERSIH PUNGLI</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>297,450,000.00</b>	<b>99</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>32,100,000.00</b>	<b>32,100,000.00</b>	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,100,000.00	32,100,000.00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>267,900,000.00</b>	<b>265,350,000.00</b>	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	81,800,000.00	81,800,000.00	
	Belanja Jasa Dokumentasi	3,000,000.00	3,000,000.00	
	Belanja Cetak	14,060,000.00	14,060,000.00	
	Belanja Penggandaan	1,440,000.00	1,440,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,200,000.00	37,200,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	125,400,000.00	122,850,000.00	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>181,400,000.00</b>	<b>115,485,000.00</b>	<b>64</b>
<b>21</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (1.19.11901.18.04)</b>	<b>88,200,000.00</b>	<b>59,285,000.00</b>	<b>67</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>14,400,000.00</b>	<b>14,400,000.00</b>	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,400,000.00	14,400,000.00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>73,800,000.00</b>	<b>44,885,000.00</b>	
	Belanja Jasa/Upah Kerja	38,000,000.00	28,500,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,000,000.00	6,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	1,500,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,800,000.00	8,885,000.00	
<b>22</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) (1.19.11901.18.06)</b>	<b>93,200,000.00</b>	<b>56,200,000.00</b>	<b>60</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>13,950,000.00</b>	<b>13,950,000.00</b>	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,950,000.00	13,950,000.00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>79,250,000.00</b>	<b>42,250,000.00</b>	
	Belanja Jasa/Upah Kerja	27,600,000.00	20,700,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000.00	9,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	0.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,650,000.00	12,550,000.00	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARKAT</b>	<b>1,067,248,000.00</b>	<b>881,945,433.00</b>	<b>83</b>
<b>23</b>	<b>PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT (1.19.11901.21.01)</b>	<b>420,675,000.00</b>	<b>397,000,164.00</b>	<b>94</b>

	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>63,500,000.00</b>	<b>63,500,000.00</b>	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,500,000.00	63,500,000.00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>357,175,000.00</b>	<b>333,500,164.00</b>	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	180,000,000.00	166,250,000.00	
	Belanja Jasa Dokumentasi	2,150,000.00	2,150,000.00	
	Belanja Cetak	1,610,000.00	1,610,000.00	
	Belanja Penggandaan	525,000.00	525,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76,250,000.00	67,185,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000.00	19,935,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,840,000.00	38,045,164.00	
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37,800,000.00	37,800,000.00	
<b>24</b>	<b>PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI BANTUAN PARTAI POLITIK (1.19.11901.21.06)</b>	<b>82,263,000.00</b>	<b>74,158,369.00</b>	<b>90</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>52,800,000.00</b>	<b>52,800,000.00</b>	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,800,000.00	52,800,000.00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>29,463,000.00</b>	<b>21,358,369.00</b>	
	Belanja Jasa Dokumentasi	500,000.00	0.00	
	Belanja Penggandaan	753,000.00	375,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,060,000.00	6,060,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,150,000.00	14,923,369.00	
<b>25</b>	<b>PEMANTAUAN PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018</b>	<b>495,440,000.00</b>	<b>366,496,900.00</b>	<b>74</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>142,250,000.00</b>	<b>136,250,000.00</b>	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142,250,000.00	136,250,000.00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>353,190,000.00</b>	<b>230,246,900.00</b>	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	193,790,000.00	101,790,000.00	
	Belanja Jasa Dokumentasi	1,600,000.00	1,600,000.00	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7,200,000.00	7,200,000.00	
	Belanja Cetak	9,200,000.00	9,200,000.00	
	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	1,499,900.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	40,000,000.00	32,042,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000.00	19,750,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,500,000.00	27,850,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48,400,000.00	29,315,000.00	
<b>26</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS LSM DAN ORMAS (1.19.11901.21.17)</b>	<b>68,870,000.00</b>	<b>44,290,000.00</b>	<b>64</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>19,125,000.00</b>	<b>19,125,000.00</b>	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,125,000.00	19,125,000.00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>49,745,000.00</b>	<b>25,165,000.00</b>	
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	11,375,000.00	0.00	
	Belanja Jasa Dokumentasi	500,000.00	0.00	
	Belanja Cetak	420,000.00	0.00	
	Belanja Penggandaan	1,050,000.00	225,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000.00	962,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	9,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	14,978,000.00	
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5,400,000.00	0.00	
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESADARAN BELA NEGARA</b>	<b>444,030,000.00</b>	<b>436,215,000.00</b>	<b>98</b>
<b>27</b>	<b>PELATIHAN BELA NEGARA BAGI PEJABAT EKSEKUTIF, LEGISLATIF, TNI DAN POLRI (1.19.11901.25.01)</b>	<b>444,030,000.00</b>	<b>436,215,000.00</b>	

	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>444,030,000.00</b>	<b>436,215,000.00</b>	
	Belanja Bahan - bahan Praktik	30,000,000.00	30,000,000.00	
	Belanja jasa transportasi dan akomodasi pihak ketiga	5,250,000.00	5,250,000.00	
	Belanja Jasa Dokumentasi	2,000,000.00	2,000,000.00	
	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	50,000,000.00	49,500,000.00	
	Belanja Cetak	1,280,000.00	1,280,000.00	
	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	
	Belanja sewa sound system	2,000,000.00	2,000,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71,500,000.00	71,500,000.00	
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	185,500,000.00	185,500,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000.00	5,450,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,000,000.00	25,235,000.00	
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	55,500,000.00	55,500,000.00	
X	<b>PASILITAS KETAHANAN EKONOMI DAERAH</b>	<b>48,200,000.00</b>	<b>48,200,000.00</b>	<b>100</b>
28	<b>PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH (1.19.11901.27.01)</b>	<b>48,200,000.00</b>	<b>48,200,000.00</b>	<b>100</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>26,750,000.00</b>	<b>26,750,000.00</b>	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,750,000.00	26,750,000.00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21,450,000.00</b>	<b>21,450,000.00</b>	
	Belanja Jasa Dokumentasi	900,000.00	900,000.00	
	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,800,000.00	7,800,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,750,000.00	6,750,000.00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>6,400,000,000</b>	<b>6,004,191,707</b>	<b>94</b>

## Capaian Renstra SKPD

Adapun Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 :

NO.	Bidang/Urusan Indikator	JUMLAH
1.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Organisasi)	138
2.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	65
3.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%)	92%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai sebagai indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Disamping itu Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainnya, sehingga akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

## 2.3 Isu-Isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD

Strategis yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang

relevan. Secara rinci, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone diuraikan dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Adapun strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Masih perlunya ditingkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, DPD Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.
2. Masih terdapat penyakit masyarakat (pekat) antara lain prostitusi, trafficking, penyalahgunaan narkoba, illegal logging, pengguna minuman keras(miras) dan penyakit masyarakat lainnya.
3. Belum optimalnya nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi yang tidak terbendung.
4. Munculnya isu- isu terorisme, munculnya potensi konflik berbasis SARA dan tuntutan pemekaran wilayah.
5. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
6. Belum optimalnya pendidikan politik, peran partai politik dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta pengelolaan administrasi partai politik.

## **BAB III**

### **TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yaitu Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian juga pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahandan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi.

Selain dari pada itu juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-Line.

Hingga saat ini program dan kegiatan yang terkait kebijakan nasional tersebut belum terlaksana secara optimal. Kedua kebijakan dan program nasional tersebut di atas masih menjadi pekerjaan rumah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone yang perlu dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Kab.Bone.Dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Kab. Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah di Kab. Bone.

#### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone**

##### **3.2. TUJUAN**

1. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan.
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan .
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik.



Tabel 3.2

## Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	25%	26%	27%	28%	30%
		Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	80%	82%	85%	87%	90%
2	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA	0%	0%	0%	0%	0%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	CC	B	B	BB	BB

**IV.2.SASARAN**

Dengan mengacu kepada Misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pemerintahan yang memenuhi budaya kerja organisasi Pemerintah Kabupaten Bone, yaitu : Kerja Cerdas, Kerja Keras, kerja ikhlas, Kerja Tuntas, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik;
2. Misi 2 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol
  - b. Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara
  - c. Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 3.3

## Sasaran dan Indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	25%	26%	27%	28%	30%
		Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	34 Orpol/Ormas	35 Orpol/Ormas	36 Orpol/Ormas	37 Orpol/Ormas	38 Orpol/Ormas
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	80%	82%	85%	87%	90%
		Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara	5, 6 %	6, 8 %	7, 8 %	8, 8 %	9, 9 %
2	Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA	0%	0%	0%	0%	0%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	CC	B	B	BB	BB

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sejalan dengan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone adalah :

“Masyarakat Bone yang bersatu dan demokratis dalam kehidupan yang sehat , cerdas dan sejahtera”

Dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone adalah:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang baik dan bertanggungjawab;
2. Meningkatkan tatanan demokrasi dan menjamin tegaknya supremasi hukum ;
3. Memantapkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa ;
4. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan pengembangan nilai – nilai kearifan lokal serta persatuan dan kesatuan bangsa ;

Adapun Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>
<b>1</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (1.19.11901.01.02)</b>
	<b>Belanja Barang danJasa</b>
	Belanja Telepon
<b>2</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (1.19.11901.01.03)</b>
	<b>Belanja Barang danJasa</b>
	Belanja Jasa Service Alat Elektronik
<b>3</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (1.19.11901.01.07)</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Honorarium Tim Monitoring
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang
	Honorarium Bulanan
	<b>Belanja Barang danJasa</b>
	Belanja Jasa/Upah Kerja
	<b>Belanja Premi Asuransi</b>
	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
<b>4</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (1.19.11901.01.15)</b>

	<b>Belanja Barang danJasa</b>
	Belanja Surat Kabar/Majalah
<b>5</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH (1.19.11901.01.23)</b>
	<b>Belanja Barang danJasa</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
<b>6</b>	<b>PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.19.11901.01.24)</b>
	<b>Belanja Barang danJasa</b>
	Belanja Alat Tulis Kantor
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
	Belanja Cetak
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>
<b>7</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAAN DINAS/OPERASIONAL (1.19.11901.02.05)</b>
	<b>Belanja Modal</b>
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
<b>8</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR (1.19.11901.02.07)</b>
	<b>Belanja Modal</b>
	Belanja Modal Pengadaan Gorden
<b>9</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR (1.19.11901.02.09)</b>
	<b>Belanja Modal</b>
	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book
<b>10</b>	<b>PENGADAAN MEBELEUR (1.19.11901.02.10)</b>
	<b>Belanja Modal</b>
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
	Belanja Modal Pengadaan Almari
<b>11</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (1.19.11901.02.22)</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor</b>
	Belanja Bahan Baku Bangunan
<b>12</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (1.19.11901.02.24)</b>
	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>
	Belanja Penggantian Suku Cadang
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>
<b>13</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>

<b>14</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>
	Belanja Pegawai
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Belanja Barang dan Jasa
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
	Belanja Cetak
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>
<b>15</b>	<b>PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN (KOMINDA) (1.19.11901.15.01)</b>
	Belanja Pegawai
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Belanja Barang dan Jasa
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
<b>16</b>	<b>RAKOR POLKAM TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN (1.19.11901.15.11)</b>
	Belanja Pegawai
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Belanja Barang dan Jasa
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Cetak
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
<b>17</b>	<b>TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (1.19.11901.15.12)</b>
	Belanja Pegawai
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Belanja Barang dan Jasa
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Cetak
	Belanja Penggandaan
	Belanja Sewa Tenda
	Belanja Sewa Saund System
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
<b>18</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) (1.19.11901.15.08)</b>
	Belanja Pegawai

	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa/Upah Kerja
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>
<b>19</b>	<b>PENINGKATAN KERJA SAMA DAN SINERGITAS PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS ANTARA PEMDA ,TNI,POLRI,KEJAKSAAN,PENGADILAN DAN DPRD DI KABUPATEN BONE (1.19.11901.1</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Cetak
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
<b>20</b>	<b>SATGAS DAERAH SAPU BERSIH PUNGLI</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Cetak
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
<b>VII</b>	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>
<b>21</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (1.19.11901.18.04)</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa/Upah Kerja
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
<b>22</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) (1.19.11901.18.06)</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa/Upah Kerja
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
<b>VII</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARKAT</b>

<b>23</b>	<b>PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT (1.19.11901.21.01)</b>
	Belanja Pegawai
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Cetak
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
<b>24</b>	<b>PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI BANTUAN PARTAI POLITIK (1.19.11901.21.06)</b>
	Belanja Pegawai
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
<b>25</b>	<b>PEMANTAUAN PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018</b>
	Belanja Pegawai
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
	Belanja Cetak
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
<b>26</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS LSM DAN ORMAS (1.19.11901.21.17)</b>
	Belanja Pegawai
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Cetak
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESADARAN BELA NEGARA</b>
<b>27</b>	<b>PELATIHAN BELA NEGARA BAGI PEJABAT EKSEKUTIF, LEGISLATIF, TNI DAN POLRI (1.19.11901.25.01)</b>
	Belanja Barang dan Jasa



	Belanja Bahan - bahan Praktik
	Belanja jasa transportasi dan akomodasi pihak ketiga
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja jasa transportasi dan akomodasi
	Belanja Cetak
	Belanja Penggandaan
	Belanja sewa sound system
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
<b>X</b>	<b>PASILITAS KETAHANAN EKONOMI DAERAH</b>
<b>28</b>	<b>PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH (1.19.11901.27.01)</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
	Belanja Jasa Dokumentasi
	Belanja Penggandaan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019**

**SKPD/UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BONE**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> <li>- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar</li> <li>- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35,110,000</li> <li>17,300,000</li> <li>133,027,200</li> <li>20,000,000</li> <li>150,000,000</li> <li>260,363,300</li> </ul>	
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>- Pengadaan Mebeleur</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30,000,000</li> <li>84,550,000</li> <li>76,582,260</li> </ul>	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Formal</li> </ul>	60,000,000	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>	8,000,000	
5	Penunjang Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana Perangkat Daerah</li> </ul>	25,300,000	
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>59,000,000</li> <li>64,600,000</li> </ul>	
7	Pendidikan Politik Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan Kepada Masyarakat</li> <li>- Pemantauan dan Pengawasan Administrasi Bantuan Partai Politik</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Administrasi /Pertanggungjawaban Dana Parpol</li> <li>- Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah terkait Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019</li> <li>- Peningkatan Kapasitas LSM dan Ormas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>469,575,000</li> <li>22,313,000</li> <li>130,000,000</li> <li>310,490,000</li> <li>53,370,000</li> </ul>	
8	Peningkatan Perlindungan Masyarakat Dan Kesadaran Bela Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Bela Negara</li> <li>- Pengawasan Dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>449,887,000</li> <li>19,700,000</li> </ul>	
9	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan (KOMINDA)</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</li> <li>- Rakor Polkam Tingkat Kabupaten dan Kecamatan</li> <li>- Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial</li> <li>- Peningkatan Kerja sama dan Sinergitas Pemeliharaan Kantrantibmas Antara Pemda TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan dan DPRD Di Kabupaten Bone</li> <li>- Satgas Daerah Sapu Bersih Pungli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>272,000,000</li> <li>81,200,000</li> <li>443,200,000</li> <li>569,232,240</li> <li>1,598,000,000</li> <li>257,200,000</li> </ul>	

## BAB V

### PENUTUP

Dari uraian Bab I Pendahuluan sampai dengan Bab IV Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Rencana Kerja mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena rencana kerja merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintahan Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas.
3. Kualitas penyusunan Rencana Kerja akan sangat menentukan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang memberikan kepada masyarakat penggunaanya.
4. Pengimplementasi Rencana Kerja ini tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen dalam lingkup kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Watampone, 15 April 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BONE



DRAY VIBRIANTO, S.IP, M.Si  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19740315 199303 1 006